

**PEMERINTAHAN MARGA SANGA DESA TAHUN 1906-1950
(SUMBANGAN MATERI MATA KULIAH SEJARAH
POLITIK)**

SKRIPSI

Oleh :

Heru Herman

06041381722050

Program Studi Pendidikan Sejarah



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**PEMERINTAHAN MARGA SANGA DESA TAHUN 1906-1950
(SUMBANGAN MATERI MATA KULIAH SEJARAH
POLITIK)**

SKRIPSI

oleh

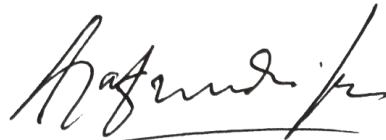
Heru Herman

NIM: 06041381722050

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui

Pembimbing,



**Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D.
NIP. 196109231987031001**

Disahkan,

**a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

**PEMERINTAHAN MARGA SANGA DESA TAHUN 1906-1950
(SUMBANGAN MATERI MATA KULIAH SEJARAH
POLITIK)**

SKRIPSI

oleh

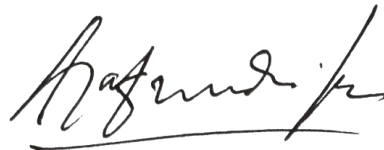
Heru Herman

NIM: 06041381722050

Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan:

Pembimbing,



**Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D.
NIP. 196109231987031001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan



**Dr. Farida, M.Si
NIP. 196009271987032002**

Koordinator Program Studi,



**Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP.198411302009121004**

**PEMERINTAHAN MARGA SANGA DESA TAHUN 1906-1950
(SUMBANGAN MATERI MATA KULIAH SEJARAH
POLITIK)**

SKRIPSI

oleh

Heru Herman

NIM: 06041381722050

Program Studi Pendidikan Sejarah

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Desember 2021

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D. 

**Palembang, 21 Desember 2021
Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah**



**Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Herman

Nim : 06041381722050

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pemerintahan Marga Sanga Desa tahun 1906-1950 (Sumbangan Materi Mata Kuliah Sejarah Politik)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Desember 2021



Yang membuat pernyataan

Heru Herman

NIM 06041381722050

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Pemerintahan marga Sanga Desa tahun 1906 – 1950 (Sumbangan Materi Mata Kuliah Sejarah Politik)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D, Bapak Adhitya Rol Asmi, M.Pd serta Ibu Dra. Yunani Hasan, M.Pd. sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Dr. Syarifuddin, M.Pd., Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd. selaku penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini, ucapan terima kasih untuk Bapak dan Ibu seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Terakhir, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penulis baik secara materi, pikiran (gagasan), tenaga, perasaan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya dan bidang Studi Pendidikan Sejarah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Palembang, 21 Desember 2021

Penulis,


Heru Herman

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang tuaku tercinta. Terima kasih telah mendidik, merawat dan membesarkanku hingga saat ini. Terima kasih banyak perjuangannya Ayah dan Ibu yang selalu mendukung dan memberikan semangat terhadap perjalanan studiku di Universitas Sriwijaya. Berkat doa, nasihat dan semangat yang kalian berikan akhirnya Skripsi ini bisa aku selesaikan.
- ❖ Kedua adikku beserta sanak famili yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
- ❖ Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi saya. Bapak Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D., Bapak Adhitya Rol Asmi, M.Pd., serta Ibu Dra. Yunani M.Pd yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran terhadap kemajuan Skripsi saya. Berkat motivasi dan saran dari Bapak dan Ibu, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Drs. Supriyanto, M.Hum., Drs. Alian, M.Hum., Dr. Farida, M.Si., Dr. L.R. Retno Susanti, M.Hum., Dra. Sani Safitri, M.Si., Dr. Dedi Irwanto, M.A., Dr. Hudaidah, M.Pd., Aulia Novemy Dhita SBK, S.Pd., M.Pd., dan Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd. Terima kasih telah mendidik, membimbing dan memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dalam perjalanan studiku.
- ❖ Manusia baik yang selalu menjadi tempat untuk bercerita dan saling peduli satu sama lain, Rizky A'aliyah serta sahabat tempat berkeluh kesah dan bertanya untuk memecahkan masalah Annisa Cieka Putri, Puji Lestari serta Putri Berliana.

Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan skripsi ini.

- ❖ **Rekan-rekan seperjuanganku lainnya dari Pendidikan Sejarah 2017 kelas Palembang, Ageng, Agung, Aldi, Alim, Amir, Andini, Bunga, Dandi, Defri, Deppendra, Egi, Febridho, Feni, Indah, Made, Mahmud, Marwah, Merinda, Nisak, Ratna, Rajez, Rini, Robi, Roni, Widya dan Yogik.**
- ❖ **Rekan-rekan seperjuanganku Pendidikan Sejarah 2017 Kelas Indralaya. Terima kasih atas kebersamaan yang kita lalui selama 4 tahun perjalanan ini.**
- ❖ **Keluarga besar HIMAPES 2015, 2016, 2018, 2019 serta 2020.**
- ❖ **Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian Skripsiku mulai dari instansi hingga orang-orang baik yang ditemukan selama ini.**
- ❖ **Almamater kebanggaanku – Universitas Sriwijaya.**

MOTTO

“Dengan Tanganku”

Daftar Isi

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	v
PRAKATA	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRAC	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pembatasan masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Sistem Pemerintahan Tradisional	11
2.2 Pengertian dan perkembangan awal Marga	12
2.3 Kedatangan Priyayi dari Pesisir Utara Jawa	14
2.4. Marga pada Masa Kesultanan Palembang	15
2.5 Belanda dan upaya menanamkan legitimasi kekuasaan	18
2.5.1 Pemerintahan Tidak Langsung	18
2.5.2 Kodifikasi UU Simbur Cahaya	19
2.5.3 Desakralisasi para <i>Puyang</i> Uluang	20

2.5.4 Plagiasi Kebudayaan Kesultanan.....	20
2.6 Marga pada Masa Pemerintahan Karesidenan.....	21
2.7 Marga Sanga Desa dari Sisi Kewilayahan	24
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Metode Penelitian	26
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	26
3. 2. 1 Heuristik.....	26
3. 2. 2 Kritik Sumber	28
3.2.2.1 Kritik Ekstern.....	28
3.2.2.2 Kritik Intern	30
3.2.4 Interpretasi	32
3.3 Historiografi.....	33
3.4 Pendekatan	34
3.4.1 Pendekatan Politik	34
3.4.2 Pendekatan Sosiologi.....	34
3.4.3 Pendekatan Antropologi	35
3.4.4 Pendekatan Geografi.....	36
BAB IV.....	37
PEMBAHASAN.....	37
4.1. Sejarah Berdirinya Marga Sanga Desa	37
4.2 Pemerintahan Marga Sanga Desa Sebelum peralihan wilayah Administratif.....	41
4.2.1 Topografi dan Geologi Marga Sanga Desa.....	41
4.3 Marga Sanga Desa setelah Peralihan wilayah administratif.....	46
4.3.1 Pemerintahan Marga Sanga Desa Setelah Peralihan Administratif.....	47
4.3.1.1 Kekuasaan Eksekutif	48
4.3.1.2 Kekuasaan Legislatif	49
4.3.1.3 Kekuasaan Yudikatif	50
4.3.2 Topografi Marga Sanga Desa	51
4.3.3 Pergantian Pasirah.....	53
4.3.4 <i>Religio Magis</i> dan Adat Masyarakat marga Sanga Desa.....	55

4.4 Kebijakan di Karesidenan Palembang dalam tahun 1930-an	57
4.4.1 Penghapusan Sistem Distrik	58
4.4.2 Zaman Kupon	59
4.4.3 <i>Besluit</i> Residen Palembang 1933 dan IGOB 1938	60
4.5 Pemerintahan Marga Sanga Desa Masa Pemerintahan Jepang	61
4.6 Pemerintahan Marga Sanga Desa Masa Kemerdekaan	64
4.6.1 Agresi Militer Belanda I dan Pengungsian Penduduk	66
4.6.2 Agresi Militer Belanda II dan Pendudukan Marga Sanga Desa.....	68
4.7 Marga Sanga Desa Tahun 1950	69
4.8 Sumbangan Materi Mata Kuliah Sejarah Politik	69
BAB V	72
KESIMPULAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
Daftar Pustaka	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Birokrasi Karesidenan	23
Bagan 4.1 Birokrasi Marga Sanga Desa sebelum Peralihan Administratif	45
Bagan 4.2 Birokrasi Marga Sanga Desa sebelum Peralihan Administratif.....	46
Bagan 4.3 Struktur Birokrasi masa Pemerintahan Militer Jepang	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Geografi Marga Sanga Desa	24
Gambar 4.1 Topografi dan wilayah marga Sanga Desa	41
Gambar 4.2 Peta Topografi marga Sanga Desa	51
Gambar 4.3 Sekajoe	63
Gambar 4.4 Dislocatie Sector Sekajoe	67

DAFTAR LAMPIRAN

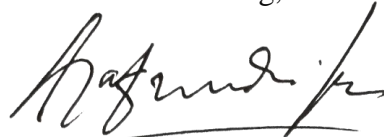
DAFTAR INFORMAN	78
Lampiran 1 Usul Judul	79
Lampiran 2 SK Pembimbing	80
Lampiran 3 SK Penelitian	82
Lampiran 4 SK Penelitian DPM-PTSP	85
Lampiran 5 SK Penelitian Arsip Nasional Republik Indonesia	89
Lampiran 6 SK Penelitian Kecamatan Sanga Desa	91
Lampiran 7 Kartu Bimbingan	92
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian	94
Lampiran 9 Sumbangan Materi Mata Kuliah Sejarah Politik	98

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemerintahan marga Sanga Desa tahun 1906 - 1950”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya marga Sanga Desa serta sistem pemerintahan yang diterapkan di tiga zaman yang berbeda, sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Militer Jepang dan pemerintahan Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi sejarah dengan pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Politik, pendekatan Geografi, pendekatan Antropologi serta pendekatan Sosiologi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa marga Sanga Desa mulanya terbentuk di zaman Kesultanan Palembang dan dikategorikan sebagai wilayah “*Kepungutan*”. Kemudian di era pemerintahan Hindia Belanda, marga Sanga Desa masuk dalam sistem pemerintahan *Onderafdeeling* Moesi Oeloe dan dipindahkan ke sistem pemerintahan *Onderafdeeling* Moesi Ilir pada tahun 1906 dan dibawah Sub Distrik pada tahun 1912-1930. Pemerintahan Militer Jepang di Palembang mengadopsi sistem pemerintahan yang digunakan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan, pemerintahan marga di Karesidenan Palembang termasuk marga Sanga Desa di akui lewat Undang Undang 1945 pasal 18 Romawi II. Pemerintahan marga Sanga Desa di era kemerdekaan berada di bawah warisan sistem pemerintahan Militer Jepang.

Kata kunci : *Sanga Desa, Pemerintahan Marga, Karesidenan Palembang*

Pembimbing,



Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd.,Ph.D
NIP. 196109231987031001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



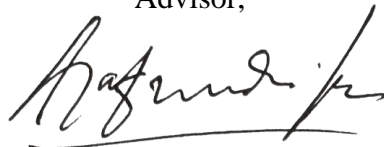
Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004

ABSTRACT

This research is entitled "Government of the Sanga Desa clan in 1906 - 1950". This study aims to determine the history of the establishment of the Sanga Desa clan and the government system that was applied in three different eras, since the Dutch East Indies government, the Japanese Military government and the Indonesian government. Methodology used in this study is a historical methodology with data collection through observation, literature study and interviews. The approach used is a political approach, a geography approach, an anthropological approach and a sociological approach. Based on the results of the study, it is known that the Sanga Desa clan was originally formed during the Palembang Sultanate era and was categorized as a "*Kepungutan*" area. Later in the era of the Dutch East Indies government, the Sanga Desa clan was included in the *Onderafdeeling* Moesi Oeloe government system and was transferred to the *Onderafdeeling* Moesi Ilir government system in 1906 and under the Sub-District in 1912-1930. The Japanese military government in Palembang adopted the government system used by the Dutch East Indies government. During the independence period, the clan government in the Residency of Palembang, including the Sanga Desa clan, was recognized through UU 1945 article 18 Roman II. The government of the Sanga Desa clan in the independence era was under the legacy of the system Japanese Military Administration.

Keywords: *Sanga Desa, Marga Government, Residency of Palembang*

Advisor,



Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D
NIP. 196109231987031001

Acknowledged by,
Coordinator of History Education Study Program



Dr. Syarifuddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kawasan Nusantara sejak dulu punya catatan panjang akan sistem pemerintahan dalam perodesasi sejarahnya. Sistem pemerintahan di Nusantara sendiri dibagi atas dua ciri, sistem pemerintahan adalah sistem pertama ialah pemerintahan tradisional yang secara murni muncul pada berbagai kelompok suku dan sub suku bangsa. sistem pemerintahan kedua adalah sistem pemerintahan yang mendapatkan pengaruh dari luar seperti sistem pemerintahan Kesultanan. Kedua sistem pemerintahan tersebut pernah dijalankan di wilayah Sumatera bagian Selatan (Hidayah,dkk.,1993 : 3).

Sistem pemerintahan di wilayah Sumatera bagian Selatan dalam hal ini (Palembang) diyakini juga mendapatkan pengaruh dari luar setelah kedatangan para Priyayi pesisir Utara Jawa. Kedatangan para Priyayi ini dipicu oleh konflik internal yang terjadi di Kesultanan Demak pasca Sultan Trenggana meninggal dunia. Terjadi perebutan takhta kekuasaan antara Aria Penangsang dari Jipang dan Pangeran Adiwijaya dari Pajang. Kelompok pendukung Aria Penangsang yang kalah dalam perseteruan ini kemudian mengungsi ke Palembang. Terjadinya migrasi para Priyayi dari Demak ke Palembang diyakini karena Palembang pada waktu itu merupakan wilayah subordinat dari Kesultanan Demak (Hanafiah,1995 :129-30).

Kota Palembang terletak pada wilayah yang strategis sebagai kota pelabuhan. Wilayahnya yang sedikit menjorok ke dalam dari daerah pantai membuat pelabuhan Palembang menjadi aman. Pelabuhan ini terhubung dengan jaringan jaringan sungai yang membentang hingga ke daerah pedalaman. Lewat jaringan jaringan sungai tersebut, terjalin hubungan dagang antara wilayah pedalaman dan Kota Palembang. Melihat sumber daya alam yang besar di wilayah pedalaman, sejak lama utusan dari penguasa Palembang sering mengarungi

wilayah pedalaman untuk menanamkan pengaruh di berbagai wilayah (Irwanto,2010 :7-9).

Masyarakat pedalaman Palembang terdiri atas etnis yang beragam. Umumnya mereka meyakini bahwa mereka merupakan keturunan dari nenek moyang yang disebut *Puyang*. Para *Puyang* ini menjelma sebagai sosok yang menguatkan ikatan genealogis diantara masyarakat. Mereka mempunyai pemimpin yang mereka angkat dari kelompok mereka sendiri. Beragamnya etnis di pedalaman ini berakibat beragam pula cara merespon utusan penguasa Palembang yang datang untuk menanamkan pengaruh. Dari *Handschrift* dalam Kolonial Bibliotik diterangkan bahwa pernah ada penguasa Palembang, Dipati Karang Widara mengarungi empat muara sungai ke daerah pedalaman dan berhasil menaklukan seratus dusun. Empat muara sungai itu antara lain, sungai Lematang, Musi, Ogan dan Komering (Ismail,2003 : 19).

Priyayi yang datang dari pesisir Utara Jawa juga melakukan hal demikian. Upaya ini terus berlanjut lewat keturunan mereka, pemerintahan di Palembang diyakini telah mengadopsi sistem pemerintahan Kerajaan. Hubungan wilayah pedalaman dengan penguasa di Palembang dari waktu ke waktu semakin harmonis. Pada masa pemerintahan Pangeran Sida Ing Kenayan, terdapat inovasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan, istrinya yang bernama Ratu Sinuhun membuat kompilasi berbagai hukum adat di wilayah *Uluan* yang disebut Piagam Ratu Sinuhun (lebih dikenal sebagai Undang Undang Simbur Cahaya). Isinya mengenai aturan adat yang digunakan sebagai pedoman oleh marga marga di wilayah *uluhan* (Adil,2011 : 121-122).

Menurut J.L.K Swaab, istilah Marga berasal dari kata sanskrit "*Varga*" yang mengandung makna suatu teritori tertentu berdasarkan rumpun atau ikatan keluarga. Marga di wilayah uluan terbentuk tidak secara bersamaan,melainkan terbentuk dalam periode waktunya masing-masing (Muslimin,1986 : 15). Dalam menjalankan pemerintahannya, setiap marga umumnya mempunyai kepala marga atau pasirah yang menyandang gelar *Depati* atau *Pangeran*, ia dibantu oleh kepala dusun yang disebut *krio*, *baginda*, *lurah*, atau *ingebei* (Peeters,1997 : 88).

Palembang selanjutnya memasuki sistem pemerintahan kesultanan pada masa Ki Mas Hindi atau Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam. Hal ini ditandai terputusnya hubungan Palembang sebagai daerah di bawah pengaruh kerajaan Mataram pada tahun 1677. Marga Sanga Desa diyakini dibentuk pada masa Pemerintahan Ki Mas Hindi atau yang juga disebut Sultan Tjindeh Walang. De Stuerler mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Tjindeh Balang, daerah bernama Boelang Tengah dipecah oleh Sultan menjadi beberapa marga. Marga-marga tersebut diantaranya terdiri atas marga Kasmaran, Poendjoeng, Semangoes, Mandi Aur, Boelang Tengah, dan marga Sanga Desah (De Stuerler,1847 : 33).

Pada masa kesultanan ini mulai terjalin kontak dengan VOC dalam sejumlah kesepakatan. Paravicini dalam kunjungannya ke Palembang tahun 1755 guna meninjau ulang pelaksanaan kontrak menuturkan bahwa sistem pemerintahan di Palembang cukup unik. Sultan Palembang ternyata tidak serta merta mutlak mengambil keputusan sendiri dalam beberapa kebijakan, tanpa merumuskannya bersama dewan kesultanan, juga pemimpin lokal (pasirah). Ini disebabkan sistem pemerintahannya yang terdiri dari anggota pihak sultan, para bangsawan dan pemimpin lokal. Sultan secara mutlak hanya mengambil keputusan dalam negeri dan urusan rumah tangganya (De Faile,1971 : 24-30).

Kesultanan Palembang secara administratif telah membagi wilayah pedalaman ke dalam tiga kategori. Kategori pertama ialah kawasan *Kepungutan*, yakni kawasan yang dibebankan pajak oleh Sultan karna pertimbangan sumber daya alam yang kawasan ini punya. Kategori kedua disebut kawasan *Sikap*, masyarakat dari kawasan ini umumnya mempunyai tugas khusus seperti tukang kayuh perahu Sultan, tukang kayu keraton serta berbagai keahlian lain. Kategori ketiga umumnya berada di wilayah perbatasan Kesultanan, masyarakat wilayah ini bertugas menjaga daerah perbatasan dari gangguan luar. Kawasan ini dinamai sebagai kawasan *Sindang* (Hanafiah,2006 : 9).

Dilihat dari peta kewilayahan yang terdapat dalam disertasi Van Royen, marga Sanga Desa pada masa Kesultanan masuk dalam wilayah administratif

Kepungutan. Lewat Peta Geologi Zuid Sumatra tahun 1880, diketahui sumber daya alam di marga Sanga Desa tumbuh diatas tanah Alluvium dikenal subur, dan diyakini dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai hasil pertanian atau perkebunan. Sultan sebagai penguasa pada saat itu tentu mengambil pungutan dari hasil sumber daya alam yang ada.

Era Kesultanan Palembang berakhir setelah Belanda berhasil memenangkan peperangan melawan Palembang pada tanggal 23 Juni 1821. Sultan Mahmud Badaruddin II saat itu ditangkap kemudian diasingkan ke Ternate. Sistem pemerintahan di Palembang kemudian beralih dari semula sistem Kesultanan dengan Sultan sebagai penguasa, menjadi sistem Karesidenan dengan penguasa seorang Residen. Sejak itu, Belanda mulai berusaha menguasai bekas wilayah pemerintahan Kesultanan (*Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie*, 1865 : 74 dalam *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië*, 1865. Geraadpleegd op Delpher op 24-12-2021, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB26:001018001:00005> diakses pada 25 Agustus 2021).

Belanda berupaya menanamkan legitimasi di bekas wilayah Kesultanan dengan berbagai cara. Belanda mengawalinya dengan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*Indirectbestuur*). Dalam sistem pemerintahan tidak langsung ini, selain terdiri dari perwira militer Belanda, juga diangkat pejabat pemerintah dari golongan Priyayi bekas Kesultanan. Dengan mengikut sertakan perwakilan Pribumi, Belanda berusaha membangun kesan awal yang “bersahabat” (Natamarga, 2021 : 48).

Kemudian pada tahun 1854 Bosch (pada waktu itu menjabat sebagai Asisten Residen) diberi tugas untuk melakukan kodifikasi terhadap Undang Undang Simbur Cahaya. Kodifikasi ini bertujuan supaya hukum adat yang berlaku di *Uluang* ini tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah Belanda. Hal ini bisa dipahami karena Undang Undang yang berlaku di pedalaman Palembang ini kembali di revisi pada tahun tahun berikutnya (Adil, 2011 : 125).

Setelah seluruh wilayah bekas Kesultanan berhasil ditaklukan, sistem pemerintahan tidak langsung dihapus. Karesidenan mulai membagi wilayah pedalaman ke dalam beberapa unit administrasi. Unit administrasi pertama ialah *Afdeeling*, wilayah *Afdeeling* dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Pembagian wilayah *Afdeeling* umumnya dilandasi kepentingan geografis dan komunikasi. Dalam lingkup wilayah *Afdeeling* ada unit administrasi *Onderafdeeling*. Pembagian unit administrasi ini di duga atas dasar pertimbangan etnis. Unit pemerintahan *Onderafdeeling* dipimpin oleh Kontrolir yang berhubungan secara langsung dengan para pemimpin marga (Pasirah) (Utomo,2012 : 241 ; Hanafiah,2006 : 34-36).

Setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, marga Sanga Desa tunduk terhadap pemerintahan kolonial. Secara administratif marga Sanga Desa mulanya masuk dalam wilayah *Onderafdeeling* Moesi Oeloe. Laporan dari Moesi Oeloe tahun 1847 mengungkapkan sebuah piagam yang menyebut marga Sanga Desa. Dalam piagam tersebut disinggung seorang tokoh pasirah marga Sanga Desa bernama Anga Mengala. Tokoh yang disebut dalam piagam ini diyakini merupakan orang dari Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan tidak langsung (Van Ronkel,1908 dalam <https://www.jstor.org/stable/20769515> diakses pada 4 Oktober 2021).

Pemerintahan marga Sanga Desa tetap berada di bawah pemerintahan *Onderafdeeling* Moesi Oeloe hingga tahun 1905. Pada saat itu wilayah marga Sanga Desa terdiri atas 9 dusun. Dusun tersebut diantaranya dusun Keban, dusun Kemang, dusun Teroesan, dusun Ngoelak, dusun Ngoelak dusun Nganti, dusun Ajer Baloei dan dusun Perboe Moelih. Lewat Staaatsblad 1906, terjadi perubahan wilayah administratif marga Sanga Desa yang dipindahkan ke dalam pemerintahan *Onderafdeeling* Moesi Ilir beribukota Sekajoe. Selain itu dusun didalam lingkup marga Sanga Desa juga berubah, semula dusun Perbo Moelih masuk dalam wilayah marga Sanga Desa, namun selanjutnya ditukar dengan dusun Djoet.

Dalam pemerintahan marga Sanga Desa yang telah beralih secara administratif kewilayahan, peneliti tertarik untuk mengetahui sistem pemerintahan marga Sanga Desa sejak beralihnya wilayah administratif tersebut dari tahun 1906 hingga tahun 1950. Pemerintahan marga Sanga Desa dalam kurun waktu tersebut telah melewati berbagai zaman. Mulai dari pemerintahan Karesidenan dengan model pemerintahan ala Belanda (1906 -1942), pemerintahan Militer Jepang (1942 – 1945), hingga pemerintahan di masa Kemerdekaan (1945 – 1950).

Melalui berbagai perkembangan zaman tersebut, ada banyak peristiwa sejarah yang terjadi dan sudah sepatutnya untuk di teliti. Peristiwa sejarah tersebut tentunya menjadi catatan penting dalam sejarah lokal salah satu daerah di Sumatera Selatan. Taufik Abdullah (2021 : 12-16) merumuskan sejarah lokal sebagai kisah masa lampau dari kelompok atau sub kelompok masyarakat dalam daerah geografis yang terbatas. Berbeda dengan sejarah nasional, sejarah lokal mampu menjelaskan dinamika kehidupan masyarakat secara lebih langsung dan intim.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian tentang marga atau pasirah sebagai kepala marga yang telah lebih dahulu ditulis. Penelitian pertama merupakan karya Muslimin yang berjudul Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Karyanya ini menjelaskan bagaimana awal pemerintahan marga dimulai, mengacu karya sebelumnya dari J.W. Van Royen mengenai marga di Palembang. Amrah Muslimin juga menjelaskan bagaimana pemerintahan marga pada masa Jepang, serta landasan hukum pemerintahan marga pada masa kemerdekaan hingga dihapuskan pada tahun 1983.

Penelitian ke dua datang dari Natamarga. Penelitian ini menghasilkan buku dengan judul Kedudukan Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga tahun 1825-1942. Lewat penelitiannya Natamarga mengungkap peranan para Pasirah sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin adat dalam lingkungan marga mereka masing masing. Kekuasaan para Pasirah ini berimplikasi terhadap wibawa mereka di masyarakat. Para pasirah yang menggunakan kekuasaan

dengan baik umumnya disegani, namun tidak sedikit pula yang mendapat citra buruk karna menyalahgunakan kekuasaan.

Penelitian selanjutnya dari Apriyanti dan Dienaputra tentang Pemerintahan Marga di Lubuk Linggau tahun 1855-1983 mengungkapkan perjalanan pemerintahan marga di Lubuk Linggau dari era kolonial hingga era setelah kemerdekaan. Mulai dari ditemukannya piagam dan cap stempel marga di Tiang Pumpung Kepungut tahun 1855 hingga penghapusan marga tahun 1983.

Penelitian yang terdahulu di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai marga atau kepasirahan di Sumatera Selatan menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Mengingat sistem pemerintahan marga sudah hadir sejak zaman Kesultanan Palembang, artinya sudah berabad-abad yang lalu. Bahkan pada saat Indonesia merdeka, sistem pemerintahan ini disinggung dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam pasal yang mempunyai angka Romawi II tersebut, negara mengakui beragam sistem pemerintahan lokal yang telah lama hadir di dalam lingkup suatu masyarakat Hindia Belanda sebelumnya. Sistem pemerintahan seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat dan Marga serta Dusun di Palembang (Syawaluddin, 2015).

Relevan dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan peneliti lakukan juga membahas mengenai sistem marga yang pernah ada di Sumatera Selatan. Penelitian ini lebih sempit skop wilayahnya merujuk pada marga Sanga Desa. Marga Sanga Desa dipilih sebagai objek kajian karena dalam sejarahnya, pemerintahan marga Sanga Desa sempat beralih dari administratif kewilayahan *Onderafdeeling* Moesi Oeloe ke *Onderafdeeling* Moesi Ilir pada tahun 1906. Sejak peralihan wilayah administratif hingga tahun 1950 pemerintahan marga Sanga Desa berada dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh penguasa yang berbeda-beda. Dari tahun 1906 hingga 1942 berada di bawah sistem Karesidenan Palembang pimpinan Kolonial Belanda, kemudian dari tahun 1942 hingga 1945 berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Marga Sanga Desa beralih di bawah naungan Negara Sumatera Selatan pasca Belanda berhasil menguasai

Kewedanan Moesi Iir masa Agresi Militer. Saat penghapusan Negara Sumatera Selatan marga Sanga Desa kembali berada di bawah pemerintahan Indonesia.

Urgensi dari penelitian ini bermaksud untuk segera menulis Historiografi mengenai pemerintahan marga dalam kurun waktu tersebut. Dikhawatirkan semakin lama Historiografi itu akan ditulis, semakin sulit untuk mencari fakta dari sumber-sumber yang tidak tertulis seperti saksi sejarah. Tujuannya tidak lain untuk menambah pengetahuan akan sejarah lokal yang terjadi di daerah Sumatera Selatan dalam hal ini wilayah Sanga Desa. Oleh karena itu peneliti ingin menelusuri lebih jauh mengenai jalannya pemerintahan marga Sanga Desa tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemerintahan Marga Sanga Desa tahun 1906 - 1950”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal mula berdirinya marga Sanga Desa ?
2. Bagaimana sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa Karesidenan Palembang (1906 – 1942) ?
3. Bagaimana sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa Pemerintahan Militer Jepang (1942 – 1945) ?
4. Bagaimana sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa kemerdekaan (1945 – 1950) ?

1.3 Pembatasan masalah

Agar kajian dalam penelitian ini sesuai judul, tema dan rumusan masalah, dan tidak keluar dari ranahnya, maka diperlukan pembatasan masalah di dalam pembahasan. Peneliti membatasi ruang lingkup kajian dalam :

a. Skup Tematikal

Skup tematikal digunakan agar pembahasan tidak keluar dari tema yang ditetapkan. Tema penelitian ini ialah pemerintahan marga Sanga Desa dan pembahasannya ialah perkembangan pemerintahan marga Sanga Desa dari tahun 1906 – 1950.

b. Skup Temporal

Skup temporal berkaitan erat dengan kronologis peristiwa (waktu). Peneliti membatasi waktu pada penelitian ini dari tahun 1906 – 1950, dimulai sejak marga berubah status wilayah administratif hingga penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia.

c. Skup Spasial

Skup spasial dilakukan dengan membatasi wilayah tempat peristiwa terjadi. Di dalam penelitian ini wilayah penelitiannya adalah wilayah Sanga Desa yang sekarang menjadi kecamatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya marga Sanga Desa.
2. Untuk mengetahui sistem pemerintahan marga Sanga Desa sejak beralih status administratif kewilayahan pada masa Karesidenan Palembang (1906 – 1942).
3. Untuk mengetahui sistem pemerintahan marga Sanga Desa pada masa pemerintahan Militer Jepang (1942 – 1945).
4. Untuk mengetahui perkembangan pemerintahan marga Sanga Desa pada masa Revolusi Fisik hingga penyerahan Negara Sumatera Selatan ke pemerintah Republik Indonesia⁵ (1945 – 1950).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai perkembangan pemerintahan marga Sanga Desa dalam kurun waktu 1906 – 1950.

2. Dalam bidang akademik dapat menjadi referensi atau literatur tambahan bagi kalangan akademisi dengan penelitian relevan. Mengingat tulisan mengenai pemerintahan marga di Sumatera Selatan pada era kurun waktu diatas secara spesifik masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Regeringsalmanak Voor Nederlandsch Indie 1865

Buku dan Artikel

Abdullah, T. 2021. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Adil, 2011. *Simboer Tjahaya :Studi tentang pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*. Jakarta : Kementrian Agama

Apriyanti,E. & Dienaputra,D.R.(2015). *Pemerintahan Marga di LubukLinggau Tahun 1855-1983.Patanjala Vol.7 No.2*.Hal 233-248.

De Faile, P.d R. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta : Bharata

Hanafiah, D. (1995). *Melayu-Jawa : Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

_____ (2006).*Pemerintahan dan Biografi Bupati Bupati Muba*. Sekayu : Pemda muba

Hidayah, Z, dkk. 1993. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta : Depdikbud

Irwanto, D, dkk. 2010. *Iliran dan Uluan : Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta : Eja Publisher

Ismail, A .2004. *Marga di Bumi Sriwijaya Palembang* : Unanti Press

Natamarga, R. 2021. *Kedudukan Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga*. Sembawa : Yayasan Institut Studi Ekonomi dan Kewirausahaan.

Peteers, J. 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo : Perubahan Religius di Palembang 1821-1924*. Jakarta : INIS

Stuerler, W.L.de. 1843. *Proeve Eener Beschrijving ban het Gebied van Palembang*. Groningen : J.Oomkens

Syawaludin, Mohammad.(2015). *Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons : Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan*. *Sosiologi Reflektif*, Volume 10,No.1

Utomo, B, B, Hanafiah D, dkk. 2012. *Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya ke Palembang Modern*. Palembang : Pemkot.

Van Ronkel. 1908. *Catalogue der Maleische handschriften in het Museum van het Bataviaasol Genootschap van Kunsten en Watenchappen*. Batavia : M. Nijhoof